

Tantangan *Media Relation* Humas Dprd Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Meningkatkan Akses Keterbukaan Informasi Publik Pada Kalangan Mahasiswa Kota Makassar

Syahrani Ramadani

syahruniramadhanii@gmail.com
Universitas Muslim Indonesia

Abd. Majid

Abd.majid@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Izki Fikriani Amir

izkiamir@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tantangan media relation serta faktor -faktor yang menjadi tantangan bagi humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akses keterbukaan informasi publik pada kalangan mahasiswa kota makassar penelitian ini menggunakan Teori komunikasi informasi, Teori Sibernetik dan Teori Excelent publik relation, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari kasubag, staf dan jurnalis media. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan dan faktor – faktor yang menjadi tantangan humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu adanya keterbatasan infastruktur dan teknologi membuat masyarakat dalam mengakses informasi tidak maksimal sertaserta Komplisitas sistem, keterbatasan sumber daya, tantangan digital, adanya keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi informasi, adanya faktor utama yang dihadapi humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi dan mempercepat mempercepat eksternal yaitu terbatasnya akses keterbukaan informasi publik.keterbukaanmedia dan persaingan informasi publik dan faktor internal yaitu kurangnya relasi dengan media dengan dewan pimpinan rakyat daerah.

Kata Kunci : Media Relation, Humas, Keterbukaan Informasi Publik, DPRD

Abstract : *This study aims to find out how the challenges of media relations and the factors that are a challenge for the PR of DPRD South Sulawesi Province in increasing access to public information disclosure among Makassar city students. this is descriptive qualitative, data collection is done by interview, observation, and documentation. The number of informants in this study amounted to 6 people consisting of subdivision heads, staff and media journalists. The data analysis technique uses data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the challenges and factors that pose a challenge to the PR of the DPRD South Sulawesi Province, namely the limited*

infrastructure and technology make the community access to information not optimal as well as the complexity of the system, limited resources, digital challenges, limited human resources are also a problem. information, there are main factors faced by the PR of the South Sulawesi Provincial DPRD to facilitate and accelerate external acceleration, namely limited access to public information disclosure, media openness and competition for public information.

Keywords: : *Media Relations, Public Relations, Public Information Disclosure, DPRD.*

PENDAHULUAN :

Salah satu pilar kebebasan berekspresi, demokrasi, serta transparansi, dan pemerintah yang baik adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Menurut Sambo, (2019), Pada tataran pemerintah sangat penting fungsi dan peran informasi publik untuk membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut Budiarto, (2020) Sasaran informasi publik mencakup internal dan eksternal, yang masing-masing memiliki kebutuhan tersendiri. Institusi pemerintahan, termasuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, informasi publik dalam pelaksanaannya menjadi senyawa dengan *government public relations* (GPR) atau humas pemerintah bertujuan untuk mendiseminasikan informasi guna melayani kebutuhan masyarakat, menciptakan opini positif terhadap DPRD lembaga dan kinerjanya memperkuat reputasi institusi.

Pengaruh penting media akan digunakan untuk menyalurkan informasi untuk membentuk sikap masyarakat ataupun publik yang dituju khususnya dikalangan mahasiswa kota Makassar saat ini. Saat muncul opini publik yang negatif, kontroversial, bertentangan, disinilah salah satu peran seorang *public relations* (PR) atau humas menjadi sangat penting di setiap lembaga atau instansi, individu atau pemerintahan dalam mengelola dan *me-manage* media-media didalam maupun diluar kendali, sehingga informasi yang muncul dapat dikendalikan untuk menstabilkan keadaan.

Menurut Anggoro, (2002) bahwa fungsi pokok humas pemerintahan Indonesia pada dasarnya mengamankan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan program-program kerja secara nasional kepada masyarakat Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah, disatu pihak menampung aspirasi dan memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak.

Dalam peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa pekerjaan Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi yaitu menyusun rencana kegiatan pelaksanaan humas, mengelola bahan informasi, serta mempublikasikan dan menyajikan pemberitaan kegiatan DPRD baik ke dalam maupun keluar lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tujuan memberikan

pelayanan terbaik pada setiap kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menjaga Citra dan menciptakan inovasi-inovasi baru agar humas, protokol dan publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tetap eksis di masyarakat dan mahasiswa.

Kegiatan publikasi dan pemberian informasi kepada publik, humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerja sama dengan beberapa media yang ada di Makassar diantaranya, Koran Sindo, Fajar, Tribun Timur, Ujung Pandang Ekspres, Radar Makassar, Rakyat SulSel, Berita Kota Makassar, Sulselsatu.com, Kompas, legion news, Mitrapol, Ikon kota dan Republika.

Dengan adanya *media relation* dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maka masyarakat bisa memantau apa-apa kegiatan yang dilakukan oleh para anggota dewan, produk-produk hukum apa saja yang dikeluarkan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan serta ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Berdasarkan pada penjelasan di atas, yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai Tantangan *Media relation* humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akses keterbukaan informasi publik pada kalangan mahasiswa kota Makassar.

METODE

Jenis dan Paradigma Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuri alamiah). Menurut Kriyantono (2006), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2023. Penelitian ini di lakukan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, Jl. Urip Sumoharjo No.59, Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang, Sulawesi Selatan 90232.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah pihak yang representatif dalam memberikan informasi terkait penelitian. Peneliti melihat ada beberapa orang yang dapat dianggap representatif dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub bagian Humas dan Protokol sebagai Pelaksana teknis kehumasan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kriteria informan kedua adalah Staf bagian Humas dan Protokol yang berjumlah dua orang dan tiga orang jurnalis dari media yang bekerja sama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer
 Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Data primer dapat diperoleh dari informan.
- b. Data Sekunder
 Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer, yang diperoleh studi kepustakaan ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi
 Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung mengenai sesuatu objek, untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.
- b. Wawancara
 Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. penelitian
- c. Dokumentasi
 Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data oleh peneliti melalui pengumpulan dokumen atau foto, yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Analisi Data

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)
 Reduksi data berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik awal, perluasan, maupun tambahan. Dengan begitu, data yang telah diperoleh akan kembali di filter untuk menentukan data yang tepat untuk digunakan.
- b. Penyajian Data (*Data Display*)
 Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Penarikan
- c. Kesimpulan (*Conclusion Drawing Verification*)
 Langkah terakhir dari pengumpulan data yang telah selesai adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan *Media Relation* Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Akses Keterbukaan Informasi Publik Pada Kalangan Mahasiswa

Berdasarkan penemuan di lapangan ditemukan beberapa fakta yaitu, tingginya aktivitas mahasiswa dalam dunia akademik menjadi salah satu tantangan utama. Hal tersebut dilatar belakangi oleh meningkatnya akses informasi publik. Meningkatnya akses keterbukaan informasi publik memberikan dampak pada partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, sehingga

kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga akuntabilitas lembaga DPRD Provinsi terhadap masyarakat, dapat memantau dan mengawasi kinerja lembaga tersebut dengan lebih efektif. Kemudian mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam lembaga DPRD Provinsi.

Adapun hasil dari penelitian ini yang menjadi tantangan Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1). Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kegiatan yang dilakukan terkait dengan peningkatan akses keterbukaan informasi publik, peneliti dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa pemetaan tugas sesuai bidangnya. agar efektifitas itu tercipta. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk memfasilitasi dan mempercepat akses informasi publik. Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan SDM yang terampil dalam mengelola dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Kemudian pengembangan sistem informasi publik (SIP). Dalam rangka meningkatkan akses keterbukaan informasi publik, diperlukan sistem informasi publik yang dapat diakses oleh publik secara mudah dan transparan. Namun, pengembangan SIP memerlukan sumber daya dan anggaran yang cukup.

2). Fasilitas Kurang Memadai

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa Keterbatasan infrastruktur dan teknologi membuat masyarakat dalam mengakses informasi publik tidak maksimal, seperti kurangnya akses internet atau perangkat teknologi yang memadai. Hal tersebut memungkinkan adanya regulasi yang kurang jelas atau tidak terlaksana dengan baik terkait keterbukaan informasi publik, sehingga perlu adanya advokasi dan lobby untuk meningkatkan regulasi yang mendukung akses keterbukaan informasi publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan jumlah platform media sosial, sistem komunikasi media humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi semakin kompleks. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai elemen dari sistem tersebut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

3). Tantangan digital

Kemajuan teknologi digital membawa tantangan baru bagi media humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, seperti keterampilan teknis dalam penggunaan platform media sosial dan memahami algoritma mesin pencari. Oleh karena itu, perlu meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman mengenai teknologi digital.

Kemudian, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, media humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengambil beberapa tindakan, seperti meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman mengenai teknologi digital, meningkatkan koordinasi antara elemen-elemen sistem, melakukan pengelolaan sumber daya yang cerdas dan efisien, dan melakukan

pengukuran dampak secara sistematis untuk memperbaiki strategi komunikasi di masa depan.

Sementara itu berdasarkan teori komunikasi informasi dapat memberikan perspektif yang berguna dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh media humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Teori ini menekankan pentingnya informasi dalam proses komunikasi, yang dapat membantu media humas dalam merencanakan strategi komunikasi yang efektif.

Teori komunikasi membahas bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dipahami oleh penerima pesan. Oleh karena itu, teori komunikasi dapat membantu humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun pesan-pesan yang mudah dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan. Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat menggunakan model komunikasi seperti model S-R (*Stimulus-Response*), model S-O-R (*Stimulus-Organism-Response*), dan model transaksional untuk memahami bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dipahami oleh masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, media humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengambil beberapa tindakan, seperti meningkatkan akses informasi, menyederhanakan pesan agar mudah dipahami, meningkatkan efisiensi waktu dalam menyampaikan informasi, dan menggunakan strategi komunikasi yang tepat untuk bersaing di lingkungan informasi yang kompetitif. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi secara teratur terhadap strategi komunikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa mereka efektif dan dapat diukur secara kuantitatif.

2. Faktor-Faktor Tantangan *Media Relation* Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Akses Keterbukaan Informasi Publik Pada Mahasiswa.

Berdasarkan penemuan di lapangan dan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan media relation humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akses keterbukaan informasi publik pada kalangan mahasiswa kota Makassar, antara lain:

1. Faktor Internal

a. Pengetahuan dan latar belakang anggota dewan

Banyak anggota dewan memiliki latar belakang yang tidak diharapkan oleh publik, sehingga mereka tidak mau terbuka pada publik. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, birikrot, praktisi, dan politisi. Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan akses keterbukaan informasi publik

b. Kurangnya relasi antara humas dengan Staff komisi DPRD

Kurangnya relasi antara humas dengan Staff komisi DPRD menjadi tantangan bagi humas dalam melakukan penyebaran informasi dimana karena humas yang tidak dilibatkan ketika ada agenda sehingga humas tidak mendapat release acara kegiatan untuk diakses agar publik mendapatkan informasi

mengenai kegiatan yang dilakukan dan para staff komisi seharusnya melibatkan media.

c. Terbatasnya akses media

Meskipun saat ini telah banyak platform media sosial yang dapat digunakan, tidak semua mahasiswa aktif menggunakan atau mengakses platform tersebut. Hal ini menjadi tantangan utama dalam menjangkau mahasiswa kota Makassar.

mengatasi faktor-faktor tersebut, diperlukan suatu upaya penyediaan akses yang bisa dijangkau oleh mahasiswa agar menunjang responsif dalam pengambilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perlu meningkatkan komunikasi efektif dengan anggota dewan untuk membuka diri pada publik dan memperkuat hubungan dengan media jurnalistik sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan informasi ke publik.

Berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang menjadi tantangan media relation humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akses keterbukaan informasi publik pada kalangan mahasiswa kota Makassar menggunakan pendekatan teori sibermetik dan teori *excellence public relation* model *public information*, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

KESIMPULAN

1. Tantangan yang dihadapi oleh media humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meliputi kompleksitas sistem, keterbatasan sumber daya, dan tantangan digital. Sedangkan, tantangan yang dihadapi dalam menggunakan pendekatan teori komunikasi informasi meliputi keterbatasan akses informasi, kompleksitas pesan, keterbatasan waktu, dan persaingan informasi.
2. Faktor-faktor yang menjadi tantangan tersebut, media humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengambil beberapa tindakan, seperti meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman mengenai teknologi digital, meningkatkan koordinasi antara elemen-elemen sistem, melakukan pengelolaan sumber daya yang cerdas dan efisien, meningkatkan akses informasi, menyederhanakan pesan yang disampaikan, meningkatkan kecepatan merespon pertanyaan atau kekhawatiran publik, dan melakukan strategi komunikasi yang tepat untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima oleh publik.

RERENSI :

Anggoro, M Linggar. (2001) *Teori Dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara

Azis, Abd. (2018) *Strategi Media Relations Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sebagai Sarana Informasi Publik*.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8635/1/Abd.%20Azis.pdf>

RESPON JURNAL ILMIAH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra UMI Vol.5 No.3 2024
<https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/index>

- Darmastuti, Rini. (2012). *Media Relations Konsep, Strategi & Aplikasi. (e-book)*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Effendy, Onong Uchjana, (2007). *Ilmu komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana
- Majid, Abd., Rayudaswati, Budi. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. TegalRejo : PT Leutika Nouvalitera.
- Nurdiansyah, E. (2016). *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593>
- Nurudin, (2008). *Hubungan Media: konsep dan aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurudin, (2019). *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*. Cet III; Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sambo, Masriadi, (2019). *Media Relations kontemporer Teori dan Praktik. (e-book)*. Jakarta : Kencana.